



PERSUASIF: Petugas Satpol PP membongkar lapak yang digunakan untuk berjualan hewan kurban.

Satpol PP Tertibkan Lapak Pedagang Kambing Kurban di Gading Fajar

CANDI-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo menertibkan lapak pedagang kambing kurban yang berdiri di atas saluran air, sempadan sungai, serta area taman

milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Lokasi-nya di Jalan Sumokali Gading Fajar, Senin (25/5).

Penertiban dilakukan Pleton 4 Bidang Trantibumtranmas ber-

sama tim patroli motor (Patmor) dengan melibatkan 18 personel. Saat tiba di lokasi, petugas lebih dulu melakukan mediasi dengan para pedagang yang berjualan di area terlarang tersebut.

Plt Kabid Trantibum Satpol PP Sidoarjo, Novianto Koesno Adi Putro, mengatakan pendekatan persuasif menjadi langkah utama sebelum dilakukan penindakan.

● Ke Halaman 10



Satpol PP Tertibkan...

"Petugas lebih dulu melakukan pendekatan persuasif melalui mediasi kepada para pedagang agar memahami aturan terkait larangan penggunaan fasilitas umum, khususnya sempadan sungai dan area taman yang tidak

diperuntukkan sebagai lokasi berjualan," ujar Novianto.

Setelah proses mediasi, petugas bersama personel Pleton 4 melakukan pembongkaran lapak pedagang kambing kurban yang melanggar ketentuan. Penertiban berlangsung hingga seluruh lapak yang menempati lokasi

terlarang berhasil dibongkar.

Menurut Novianto, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan fungsi saluran air dan ruang terbuka hijau tidak terganggu.

"Kami ingin memastikan fasilitas publik tetap berfungsi sebagaimana

mestinya dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan," katanya.

Sekitar pukul 11.30 WIB, kawasan Jalan Sumokali Gading Fajar dinyatakan steril dari lapak pedagang kambing kurban.

Petugas juga memberikan peringa-

tan terakhir kepada para pedagang agar tidak kembali berjualan di lokasi tersebut.

"Peringatan tegas sudah kami sampaikan. Jika masih ditemukan pelanggaran serupa, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Novianto. (sur/vga)



Langka Sejak Pasca Lebaran, Stok Minyakita di KDKMP Magersari Kosong

KOTA-Kelangkaan Minyakita mulai dirasakan warga Sidoarjo. Sejak pasca Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah, stok minyak goreng subsidi tersebut kosong di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Magersari, Sidoarjo. Akibatnya, warga dan pedagang beralih ke merek minyak goreng lain yang masih tersedia.

Meski stok Minyakita kosong, antusias warga berbelanja di KDKMP tetap tinggi. Sebab, harga kebutuhan pokok di koperasi tersebut dinilai lebih murah dibanding toko atau pasar di luar.



DIKY SANSIR/RADAR SIDOARJO

● Ke Halaman 10 LANGKA: Penjaga KDKMP Magersari, Sidoarjo, sedang mengecek stok, Senin (25/5).



Langka Sejak Pasca Lebaran,...

Penjaga KDKMP Magersari, Jumia, mengatakan stok Minyakita sudah lama tidak datang meski pihak koperasi berkali-kali melakukan pemesanan.

"Mulai habis Lebaran mungkin ya. Sudah pesan, tapi kok belum ada," ujar Jumia kepada Radar Sidoarjo, Senin (25/5).

Untuk memenuhi kebutuhan pembeli, koperasi menyediakan minyak goreng merek lain seperti Masku dan Kunci Mas.

"Makanya diganti merek Masku sama Kunci Mas," katanya.

Menurut Jumia, Minyakita menjadi salah satu produk paling dicari warga karena harganya lebih terjangkau dibanding minyak goreng lain. Sebelum kosong, Minyakita kemasan satu liter dijual Rp 18 ribu, sedangkan kemasan dua liter sekitar Rp 38 ribu.

Sementara itu, minyak goreng merek lain dijual dengan harga lebih tinggi. Misalnya Sanco kemasan dua liter seharga Rp 41 ribu dan Kunci Mas satu liter Rp 18 ribu.

"Yang paling laris itu minyak, gula sama beras. Pokok sembako yang paling diminati warga di sini," jelas perempuan 44 tahun tersebut.

Tak hanya warga sekitar, sejumlah pedagang juga membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar di KDKMP Magersari.

"Ada juga selain warga. Kemarin banyak yang ambil minyak dalam jumlah besar," ucapnya.

Selain minyak goreng, sejumlah bahan pokok lain juga menjadi incaran pembeli. Beras SPHP Bulog kemasan

lima kilogram dijual Rp 59 ribu. Sementara gula curah Rp 17 ribu per kilogram dan gula kemasan seperti Gulaku dijual Rp 18 ribu.

Harga telur di koperasi tersebut juga lebih murah dibanding harga pasaran. Telur omega dijual Rp 29 ribu per kilogram, sedangkan di luar mencapai Rp 31 ribu. "Kalau di pasar kemarin katanya Rp 31 ribu, sini masih Rp 29 ribu," terang Jumia.

Menurutnya, warga cukup terbantu dengan keberadaan KDKMP karena harga barang lebih miring dibanding

toko lain.

"Miring, lebih murah dari harga luaran. Mungkin selisih Rp 500 sampai Rp 1.000," katanya.

Meski jumlah pengunjung harian belum terlalu ramai, aktivitas jual beli di koperasi tetap berjalan setiap hari. Rata-rata ada lima hingga enam pembeli yang datang setiap hari.

"Setidaknya masih ada terus yang beli. Warga senang kalau harganya lebih murah. Pokoknya jangan sampai lebih mahal dari luar," pungkasnya. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



INOVASI: BPPD Sidoarjo membuka layanan pembayaran PBB-P2 di Paseban Alun-alun Sidoarjo ssat CFD, Minggu (24/5).

BPPD Bebaskan Denda Pajak hingga Oktober 2026

KOTA-Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan denda pajak daerah mulai 4 Mei hingga 29 Oktober 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meringankan beban masyarakat.

Program pembebasan denda

itu mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga masa pajak tahun 2025.

Selain itu, pembebasan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi makanan dan minu-

man, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, hingga jasa kesenian dan hiburan. Program serupa juga berlaku untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah hingga masa pajak tahun 2025 serta periode Januari sampai Maret 2026.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, kebijakan

● Ke Halaman 10



BPPD Bebaskan Denda...

tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat sekaligus upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, program itu dihadirkan agar masyarakat memiliki kesempatan melunasi kewajibannya tanpa terbebani denda. "Harapannya, masyarakat dapat melunasi kewajiban

pajaknya tanpa terbebani denda serta memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya," ujar Subandi.

Ia menegaskan, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pajak menjadi kontribusi bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat.

"Kepatuhan wajib pajak sangat pen-

ting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan," tegasnya.

Untuk memudahkan pembayaran, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang telah tersedia, mulai dari perbankan, gerai ritel modern, hingga platform digital seperti QRIS dan virtual account.

Informasi lebih lanjut terkait program pembebasan denda pajak dapat diakses melalui laman resmi BPPD Si-

doarjo di bit.ly/BPPDKabSidoarjo maupun melalui QR code yang disediakan BPPD Pemkab Sidoarjo.

"Dengan adanya program ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak semakin meningkat.

Masyarakat juga diimbau segera memanfaatkan periode pembebasan denda sebelum batas waktu yang ditentukan," pungkasnya. (dik/vga)



Bupati dan Polisi Lakukan Pendalaman Dugaan Politik Uang

Di Pilkades Pabean

SEDATI-Video dugaan praktik politik uang atau serangan fajar menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, viral di media sosial, Sabtu (23/5) malam. Rekaman berdurasi enam detik itu memicu kegaduhan warga hingga berujung aksi protes di balai desa.

Dalam video yang beredar, tampak seorang pria diduga membagikan amplop kepada warga pada malam sebelum pencoblosan Pilkades. Warga menuduga amplop tersebut berisi uang dan menjadi bagian dari praktik serangan fajar untuk memengaruhi pilihan masyarakat.

Menanggapi viralnya video tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi mengaku telah berkoordinasi dengan panitia Pilkades dan perangkat desa. Namun, dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman.

"Ini sudah kemarin koordinasi dengan panitia dan lain, ya. Nanti masih pendalaman, ya. Hanya pendalaman," ujar Subandi saat dikonfirmasi, Minggu (24/5).

Sebelumnya, Subandi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengingatkan seluruh unsur perangkat desa, termasuk RT dan RW, untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkades.

Menurutnya, pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi tegas



TEREKAM: Warga memergoki adanya politik uang di Desa Pabean, Kecamatan Sedati.

apabila ditemukan adanya keterlibatan perangkat desa maupun pengurus lingkungan dalam politik praktis.

"RT dan RW adalah pelayan masyarakat. Mereka harus menjaga netralitas dan menjadi perekat sosial di lingkungan masing-ma-

sing," tegasnya.

Ia menambahkan, pengurus RT maupun RW yang terbukti menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa dapat diberhentikan dari jabatannya.

"Sanksinya jelas, jika tidak netral ya diberhentikan. Karena SK-nya ada

di Bupati. Maka Bupati wajib melakukan pembinaan," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengatakan pihak kepolisian masih mengumpulkan fakta-fakta di lapangan terkait dugaan politik uang tersebut.

"Masih kita kaji, nanti fakta-fakta di lapangan masih kita cari," ujar Christian Tobing.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut kasus tersebut, ia menyebut pihak kepolisian masih menunggu perkembangan informasi lebih lanjut.

"Belum, belum nunggu informasi," imbuhnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelumnya telah menggelar Deklarasi Damai Pilkades di Pendapa Delta Wibawa pada Rabu (13/5).

Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi menegaskan larangan keras bagi RT/RW maupun perangkat desa untuk terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu calon kepala desa.

Larangan tersebut juga diperkuat melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pilkades.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Desa Pabean, Kecamatan Sedati, tercatat mencapai 12.394 pemilih. (dik/vga)



IERI MOTIVASI: Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pesan kepada santri Ponpes Progresif Bumi Shalawat kemarin (25/5).

Zulhas Ajak Santri Ponpes Progresif Bumi Shalawat Perkuat Ketahanan Pangan

SIDOARJO – Pemerintah ingin para santri tidak hanya berkontribusi dalam dunia pendidikan. Namun, juga ikut memperkuat ketahanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong para santri untuk berinovasi memajukan sektor pangan.

Pesan itu disampaikan saat Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Progresif Bumi Shalawat kemarin (25/5). Zulhas turut menyerahkan sapi kurban jenis limosin berbobot 1.112

kilogram. Menurut dia, peran ponpes di masyarakat cukup besar. Pesantren memiliki peran penting dalam menjaga kebersamaan dan nilai gotong royong di tengah masyarakat. "Nah, saya mengajak santri untuk meningkatkan kepedulian sosial. Terutama pada momentum Idul Adha," kata Zulhas.

Dia menegaskan, kedaulatan sektor pangan memerlukan peran berbagai kalangan. Para santri harus ikut menciptakan swasembada pangan. "Bagi santri

yang punya gagasan baik untuk ketahanan pangan akan kami beri hadiah," tambah Zulhas.

Pengelola Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Aria Muhammad Ali menyampaikan apresiasi atas perhatian Menko Pangan RI. Bantuan hewan kurban itu akan memberi manfaat besar bagi warga. Saat ini, kami juga sedang menyiapkan proses pembelian untuk Idul Adha. Rencananya, ada 35 sapi tambahan dari masyarakat, tambah Aria. (ful/hen)

Jawa Pos

23 Petahana Kalah Pilkades

Kades Terpilih Dilarang Konvoi

SIDOARJO – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2026 selesai digelar. Dari 39 calon kades (cakades) petahana yang maju kembali, hanya 16 orang yang berhasil mempertahankan posisinya. Sebanyak 23 petahana gagal menang dalam pilkades.

Kemenangan incumbent tersebar di sembilan kecamatan. Di Wonoayu terdapat dua desa yang kembali dimenangkan petahana yakni Desa Mojorangung dan Desa Tanggul. Kecamatan Krembung terdapat satu desa yakni Desa Rejeni. Sementara di Porong, petahana kembali



Siapa pun yang terpilih harus bisa merangkul seluruh warga.”

Hernita Hadi Lestari
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa DPMD Sidoarjo

menang di Desa Wunut.

Kemudian di Kecamatan Jabon, petahana kembali unggul di Desa Jemirahan dan Desa Kedungrejo. Di Kecamatan Tarik juga men-

PETAHANA DI PILKADES SERENTAK

- Ada 39 kades yang maju kembali
- Sebanyak 16 orang menang
- 23 petahana kalah di pilkades
- Kemenangan petahana tersebar di 9 kecamatan

Sumber: DPMD Sidoarjo



catat dua kemenangan incumbent di Desa Segodobancang dan Desa Kalimati. Sedangkan di Waru, incumbent berhasil mempertahankan kursi di Desa Pepelegi. Sisanya tersebar di Gedangan dan Buduran.

Kabid Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Hernita Hadi Lestari menyebut pelaksanaan

pilkades secara umum berlangsung kondusif hingga seluruh tahapan penghitungan suara selesai. “Belum ada gugatan dari cakades yang kalah,” ujar Hernita.

Dia berharap seluruh pihak bisa menerima hasil Pilkades dengan baik. “Siapa pun yang terpilih harus bisa merangkul seluruh warga,” imbuhnya. Terkait partisipasi, Hernita mengatakan bahwa antusiasme masya-

rakat untuk mencoblos cukup baik. Bahkan secara rata-rata di atas 70 persen.

Antisipasi Kericuhan

Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo Kumpul M Arobi mengatakan, pengamanan tetap dilakukan hingga seluruh tahapan berakhir. Tidak berhenti sampai pemungutan suara. Polisi masih berjaga di posko pemenang dan di balai desa.

Menurut Arobi, ada larangan konvoi bagi cakades terpilih dan pendukung. Kebijakan itu diberlakukan untuk mencegah kericuhan. “Setiap kandidat sudah diimbau untuk menjaga kondusivitas. Ada larangan perayaan berlebihan,” kata Arobi. (ful/eza/hen)

Jawa Pos

Rusak Fasum, Empat Lapak Hewan Kurban di Candi Ditertibkan

SIDOARJO – Maraknya aksi penjualan hewan kurban di sejumlah jalan protokol mendapat atensi Satpol PP Sidoarjo. Kemarin (25/5), petugas menertibkan empat lapak hewan kurban yang berdiri di atas sungai dan taman di kawasan Jalan Raya Sumokali, Candi.

Plt Kabid Tibumtranmas Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno Adi mengatakan penertiban dilakukan sekitar pukul 10.00. Petugas terlebih dahulu melakukan mediasi dengan pedagang kambing kurban agar mereka membongkar lapak secara mandiri. “Total, ada empat lapak yang ditertibkan,” kata



LANGGAR ATURAN: Petugas satpol PP membongkar lapak hewan kurban yang berdiri di atas sungai di Jalan Raya Sumokali, Candi, kemarin (25/5).

Novianto kemarin (25/5).

Menurutnya, lapak pedagang hewan kurban menempati area sempadan sungai dan taman milik dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK). Sehingga, keberadaannya melanggar aturan. “Pembongkaran dilakukan karena lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk jual beli,” tambah Novianto.

Satpol PP juga memberikan peringatan terakhir kepada para pedagang agar tidak kembali berjualan di lokasi tersebut. Ada sanksi yang lebih berat bagi mereka yang melanggar aturan. (eza/hen)

Jawa Pos

13 Nama Lolos Seleksi Direksi BPR Delta Artha-Aneka Usaha



Hasil tes dan rekam jejak kami laporkan ke bupati sebagai bahan pertimbangan keputusan."

Fenny Apridawati
Sekda Sidoarjo

Keputusan Akhir di Tangan Bupati

SIDOARJO - Seluruh tahapan seleksi direksi dan komisaris PT BPR Delta Artha Perseroda dan PT Aneka Usaha Sidoarjo tuntas. Ada 13 nama yang lolos hingga seleksi akhir. Kini, nasib mereka bakal ditentukan keputusan Bupati Sidoarjo Subandi.

Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati yang juga Ketua Pansel menjelaskan, proses seleksi berlangsung lama

karena dilakukan secara ketat. Pihaknya juga menambah materi tes khusus bagi calon Direktur Operasional dan Bisnis BPR Delta Artha Perseroda dengan melihat rekam jejak peserta di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Perlu dicek rekam jejaknya di perbankan, apakah pernah terlibat kredit macet atau tidak," ujarnya.

Dari tambahan materi itu tim pansel telah mengantongi rekam jejak semua kandidat. "Hasil tes dan rekam jejak kami laporkan

ke bupati sebagai bahan pertimbangan keputusan," imbuh Fenny. Dia menegaskan, keputusan akhir penetapan direksi dan komisaris BUMD berada di tangan Subandi.

Berebut Empat Posisi

Ada empat posisi yang diperebutkan. Yakni komisaris independen, komisaris dari unsur pemerintah, serta Direktur Operasional dan Bisnis PT BPR Delta Artha. Serta satu posisi direktur PT Aneka Usaha Sidoarjo. Siapa yang

terpilih menjadi komisaris dari unsur pemerintah patut ditunggu.

Sebab, ada empat nama yang bersaing untuk jabatan tersebut. Mereka merupakan pejabat senior di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang mendekati pensiun. Yakni Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara, Kepala BPPD Noer Rochmawati, Kepala Dinas Dikbud Tirto Adi, dan Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo Bachruni Aryawan. (ful/hen)

Jawa Pos

ANRI Nilai Pengelolaan Kearsipan Salah Satu Terbaik di Indonesia

Sidoarjo, Bhirawa

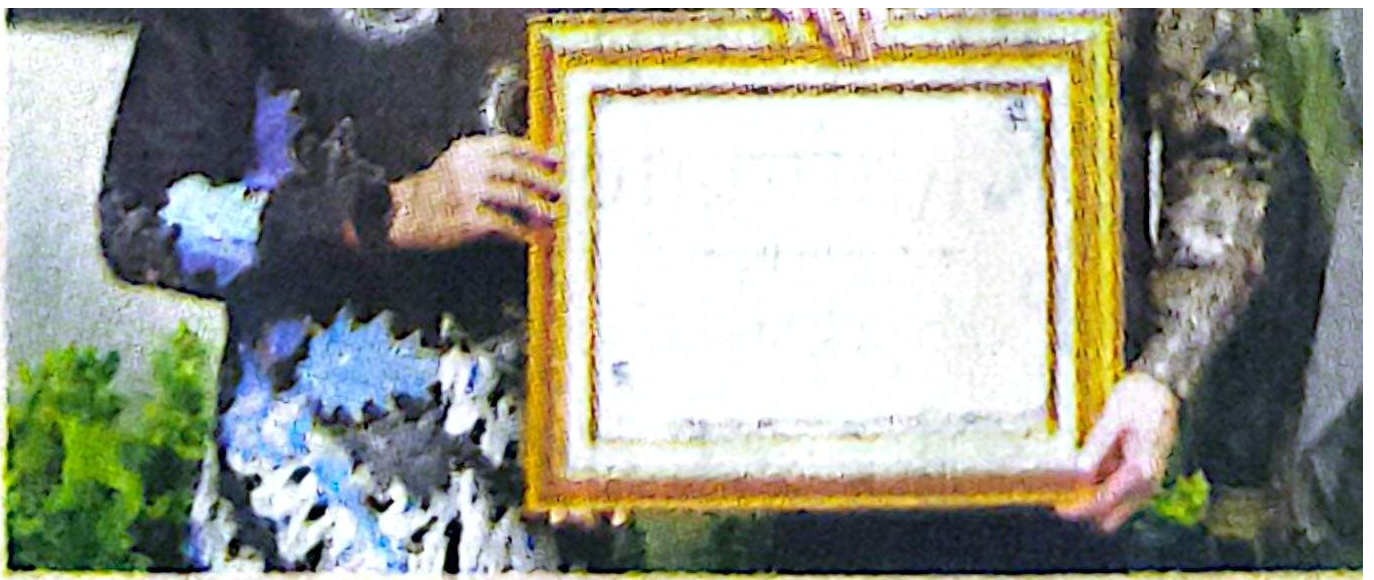
Pengawasan kearsipan di kabupaten Sidoarjo tahun 2025 mendapat penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), kategori AA atau memuaskan, dengan nilai 90.84.

Penghargaan diserahkan

langsung ke Bupati Sidoarjo. Penghargaan diserahkan langsung ke Bupati Sidoarjo di Gedung Bupati Sidoarjo.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risetlah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo





Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Kadis Kearsipan Sidoarjo Rudi Setyawan, usai rangkaian pengawasan kearsipan dari ANRI.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ANRI Nilai Pengelolaan Kearsipan Sidoarjo Salah Satu Terbaik di Indonesia

● Sambungan hal 1

yang didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rudi Setyawan SSTP.

Penghargaan ini merujuk pada undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan.

“Alhamdulillah, seluruh OPD, camat, pemerintah desa, hingga sekolah dari TK, SD, sampai SMP negeri maupun swasta telah menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai ketentuan,” komentar Bupati Subandi, Senin (25/6) kemarin, saat dikonfirmasi.

Penilaian dengan predikat AA tersebut, kata Bupati Subandi, menempatkan kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan arsip terbaik di tingkat nasional.

Dirinya terus mendorong Dinas Perpustakaan dan kearsipan kabupaten Sidoarjo kontinyu membina OPD supaya tertib arsip. Diharapkan, pengelolaan arsip yang baik, akan bisa menjadi fondasi penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

“Kami tidak ingin berhenti di predikat AA ini saja. Fokus kami adalah terus menjaga konsistensi, memperluas digitalisasi, dan memastikan seluruh unit kerja benar-benar tertib arsip,” kata Rudi, dalam kesempatan itu. [kus.gat]

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Kunjungi Bayi Penderita Kelainan Kongenital di Tarik

RedSidoarjo · Mei 26, 2026



Liputan5news.com - Sidoarjo. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Moch. Dhamroni Chudori mengunjungi seorang bayi yang mengalami kelainan bawaan sejak lahir (kongenital). Senin (25/5/2026).

Bayi tersebut diketahui bernama Dewi Andini Putri. Putri dari pasangan keluarga sederhana, warga RT 07 RW 03 Desa Gampingrowo. Bayi mungil yang berusia 6 hari itu mengalami kondisi medis langka berupa kelainan pada bagian wajah dan telinga yang dikenal dengan istilah Tessier Cleft atau kelainan kongenital bawaan. Kelainan pada bayi ditandai dengan kondisi hidung sumbing dan ukuran telinga yang kecil.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Camat Tarik M. Rofik, Kepala Desa Gampingrowo beserta perangkat desa, Kepala Puskesmas, bidan desa, hingga para kader kesehatan setempat. Kehadiran mereka menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus.



Dalam kunjungannya Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Moch. Dhamroni Chudori menyampaikan bahwa dirinya ingin memastikan bayi tersebut mendapatkan perhatian dan penanganan medis yang layak.

"Begitu mendapat informasi dari masyarakat, kami langsung datang untuk memastikan kondisi adik Dewi Andini Putri secara langsung. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian kami kepada masyarakat. Anak ini harus mendapatkan pendampingan dan penanganan kesehatan yang maksimal," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan agar seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga dinas terkait untuk bersama-sama mengawal proses pengobatan bayi tersebut agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan terbaik.

"Kami tidak ingin keluarga merasa sendiri menghadapi persoalan ini. Pemerintah harus hadir. Semoga nantinya ada langkah medis yang bisa membantu kondisi anak ini agar tumbuh dengan baik seperti anak-anak lainnya," tambahnya.

Sementara itu, sang ibu balita, Sukarni, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan berbagai pihak kepada buah hatinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa syukur karena kondisi anaknya mendapatkan perhatian serius.

"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Dhamroni dan semua pihak yang sudah datang dan peduli kepada anak saya. Sebagai orang tua tentu saya berharap anak saya bisa mendapat pengobatan dan bisa tumbuh sehat," ungkap Sukarni dengan penuh haru.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hadir di tengah masyarakat sangat membutuhkan. Terlebih bagi keluarga yang sedang menghadapi ujian berat. Warga pun berharap adanya bantuan lanjutan dan pendampingan medis bagi bayi Dewi Andini Putri agar kelak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.(Yanti)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LEGISLATIF

Lelang RS Sedati Kembali Dibuka, Anggota Komisi C Minta Berjalan Transparan

Admin — 25/05/2026

Share

🕒 Read Time: 2 Minute, 6 Second



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-

Pembangunan rumah sakit (RS) Type B di Sedati, bakal dilanjutkan pada tahun ini dengan anggaran Rp 47,5 miliar.



Progresnya telah memasuki masa tender (lelang terbuka) dikelola Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Pemkab Sidoarjo.

Pembangunan rumah sakit sebagai langkah pemerataan pelayanan kesehatan ini semestinya sudah harus selesai pada 2025.

Sayangnya, pihak rekanan (kontraktor) yang dipercaya membangun rumah sakit dengan anggaran Rp 51,7 miliar, sebagai pemenang dalam tender, tidak mampu menyelesaikan.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai leading sector atas pembangunan RS itu akhirnya melakukan pemutusan kontrak kerja dengan pihak kontraktor.

Akibatnya proyek pembangunan prasarana itu pun sempat mangkrak.

Lalu pada tahun ini dilanjutkan dengan pagu anggaran Rp 47 miliar yang proses pelaksanaannya diawali tender terbuka atau lelang melalui aplikasi Inaproc oleh pihak UPPBJ Sidoarjo.

Tahapan lelang saat ini memasuki evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan penawaran harga.

Hasil penelusuran di LPSE (Inaproc) menunjukkan pelaksanaan tender semula diikuti 90 badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Pesertanya selain dari Sidoarjo, ada juga dari Surabaya maupun luar kota lainnya, termasuk Jakarta.

Namun dari jumlah itu, hanya 11 peserta berlanjut sampai tahap mengajukan penawaran harga.

Yang cukup menarik, dalam penawaran harga atas pelaksanaan proyek fisik ini sampai turun hingga 10 persen lebih dari pagu anggaran (Rp 47,5 miliar).

Itu dilakukan PT Chiko Karya Pratama yang menempati urutan pertama. Perusahaan jasa konstruksi asal Semarang ini mengajukan penawaran Rp 37,652 miliar, lalu disusul urutan kedua, PT Sultan Sukses Mandiri Jakarta mengajukan penawaran Rp 39.900 miliar, dan PT Lestari Asi Sejahtera Bekasi senilai Rp 40,002 miliar.

Sedangkan peserta lainnya, nilai penawarannya hampir semuanya di atas Rp 41 miliar, termasuk PT Yang Andalan Utama, satu satunya peserta asal Sidoarjo yang mengajukan penawaran harga sebesar Rp 41.144 miliar. Lalu PT Permata Anugerah Yalagamudra Surabaya menawar Rp 41,355 miliar.

Menanggapi soal tender RS Sedati, Emir Firdaus, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo meminta panitia harus lebih seleksi, sebelum menentukan pemenangnya.

"Apa yang terjadi tahun lalu jangan sampai terulang. Karena keteledoran panitia tender, pemenangnya adalah PT yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga akhirnya diputus kontrak kerja di tengah jalan," tegas Emir.

Untuk dalam tender kali ini, Emir berharap panitia lebih jeli melakukan tahapan-tahapan, semuanya harus mengacu pada Perpres nomor 12 tahun 2021.

"Termasuk yang atur soal penawaran harga, bahwa penawar harga terendah tidak otomatis diputuskan menjadi pemenang," tegasnya.

"Intinya bahwa kami minta panitia benar-benar bekerja lebih profesional dan sesuai aturan. Jangan ada kong kali kong," tambah Emir, politisi PAN Sidoarjo. (Abidin)



About Post Author

admin

✉ admin@liputansidoarjo.com

🌐 https://liputansidoarjo.com

Liputan Sidoarjo.com